

**UPAYA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENJAGA
KELANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK**

*(Studi Deskriptif Pada Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Di Desa Sidopekso Kecamatan
Kraksaan Kabupaten Probolinggo)*

***THE EFFORT OF CIVIL OFFICIAL SERVANT'S PENSION ON KEEPING THE
COTINUITY OF CHILD'S EDUCATION***

*(Deskription Study on Civil Official Servant's Pension in Sidopekso Village Kraksaan
Subdistrict Probolinggo)*

Achmad Romadony, Kris Hendrijanto.
Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Achmadromadony17@gmail.com, nurdyahgianawati@yahoo.co.id

ABSTRACT

Civil servant is still a desired job by many Indonesian citizens ranging from those with senior high school to Bachelor's education because fixed guarantee pension on the payroll even though they are not in service anymore. At the time of retirement, pensioners receive only basic salary and health insurance. Basic salary received by retirees is 75%, less than when they were still in service as civil servants. In fact, they still have school children at senior high school (SMA) and Higher Education (University). This research aimed to describe the efforts of pensioners in meeting the educational needs of children in Sidopekso Village, District of Kraksaan, Probolinggo Regency. The research used qualitative, descriptive approach. Informants were determined by purposive sampling. Data were collected by observation, interviews, and documentation. Data analysis used data reduction, data presentation, and conclusion or verification. The data validity was examined by triangulation of theory and source. The results showed that they were still working after retirement in accordance with the capabilities and expertise. The efforts made by the pensioners in maintaining the continuity of children's education were by diversification of work in accordance with the capabilities and expertise, utilizing social networks i.e. borrowing money from neighbors or applying for a credit in the bank as well as leaving economically i.e. eating potluck for the sake of children education to college. All these efforts were made by the retirees only to meet the educational needs of children.

Keywords: retirement, education, efforts

PENDAHULUAN

Pegawai negeri sipil masih merupakan pekerjaan yang diidamkan oleh banyak warga Indonesia mulai dari yang memiliki pendidikan SMA sampai Sarjana, karena ada jaminan pensiun yang tetap di gaji meskipun sudah tidak bekerja lagi, jasanya yang telah mengabdikan kepada negara. Menurut Situmorang (1994:18) dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 1961, pegawai negeri sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, di gaji menurut peraturan pemerintah yang berlaku dan di pekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang. Akan tetapi, untuk menjadi pegawai negeri sipil tidak semudah yang kita bayangkan, ada beberapa tahapan seleksi yang harus dilewati oleh semua pelamar calon pegawai negeri sipil. Seperti, persyaratan umum, khusus, serta tes kompetensi dasar. Untuk penentuan kriteria kelulusan merupakan tanggung jawab panitia pengadaan calon pegawai negeri sipil yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam menjalankan pekerjaan dan pengabdian kepada negara, pegawai negeri sipil mendapatkan hak-hak dalam

menjalankan tugasnya. Hak-hak pegawai negeri sipil tersebut dapat berupa, gaji pokok, pakaian dinas, perawatan, tunjangan keluarga, mobil, rumah dinas, dan jaminan hari tua. Semua hak yang diperoleh pegawai negeri sipil tersebut untuk menunjang dan memperlancar pekerjaannya dalam melayani masyarakat.

Setelah memasuki masa pensiun gaji yang akan diterima mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan sebagai pensiun. Pada waktu masa pensiun, seseorang hanya mendapatkan gaji pokok dan asuransi kesehatan saja yang diterima oleh pensiunan. Gaji pokok yang diterima oleh pensiunan adalah 75% mulai berkurang dibandingkan dengan masih aktif sebagai pegawai negeri sipil. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pensiunan, karena biaya pengeluaran sehari-hari khususnya untuk membiayai pendidikan anak yang masih sekolah dan kuliah di luar Kabupaten Probolinggo tidak cukup serta juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berkurang.

Biaya pendidikan di Indonesia khususnya untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Perguruan Tinggi tidak gratis. Biaya tersebut dapat membebani orang tua siswa yang pensiunan. Biaya yang dibebani kepada orang tua siswa digunakan untuk membayar SPP, daftar ulang, renovasi gedung, buku, dan

kegiatan ekstrakurikuler. Pemerintah dalam hal ini selaku pemangku kepentingan mempunyai program pendidikan gratis 12 tahun membebaskan biaya pendidikan hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini yang membuat pensiunan mengupayakan supaya anak bisa sekolah sampai perguruan tinggi yang diinginkan. Berbagai cara dilakukan oleh pensiunan dalam menjaga kelangsungan pendidikan anak. Apalagi anak yang masih kuliah di perguruan tinggi di kota.

Selain untuk membayar uang sekolah anak, pensiunan memiliki banyak tanggungan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti tagihan setiap bulan, diantaranya pembayaran rekening listrik, PDAM, dan uang belanja untuk makan. Dalam hal ini pensiunan harus menyetorkan uang untuk membayar tagihan setiap bulan. Tagihan setiap bulan pensiunan bisa melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dan pensiunan mendapatkan surat peringatan harus segera di lunasi. Karena kalau masih belum membayar tagihan setiap bulan, maka akan ada pemutusan sementara atau di nonaktifkan dan pemutusan sementara tersebut bisa mengganggu aktifitas sehari-hari pensiunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Jaminan Pensiun

Program jaminan hari tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang di bayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu (http://www.bpjs.info/peraturan/Peraturan_Pemerintah-31/ (diakses tanggal 03 November 2015)).

Problematika pensiun di Indonesia selama ini adalah soal manajemen keuangan, dari yang ada sekarang pemerintah lebih banyak berkontribusi ketimbang PNS itu sendiri dalam menyiapkan dana pensiun, sehingga harus diubah. Rencananya *fully funded* ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan pemerintah (PP). Transformasi ini adalah upaya pemerintah untuk mengurangi beban APBN untuk membayar pensiun PNS yang setiap tahun naik sebesar Rp 5 triliun. Salah satu yang dilakukan adalah mengubah sistem pensiun dari *pay as you go* yang berlaku saat ini menjadi sistem *fully funded* mulai tahun depan. *Pay as you go* adalah pendanaan pensiun yang dibiayai langsung oleh negara melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Sedangkan dalam *fully funded*, pembayaran pensiun bersumber dari iuran bulanan, yang dilakukan bersama-sama antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Dana yang terkumpul kemudian akan dijadikan anggaran pensiun. Menurut Sofian Effendi kepada Kontan (2014) :

Alasannya karena saat ini saja negara mesti mengeluarkan dana Rp 70 triliun setiap tahun untuk membayar 2,5 juta pensiunan PNS. Dalam lima tahun ke depan ada tambahan 2,5 juta pensiunan PNS baru, sehingga total menjadi 5 juta pensiunan PNS. "Negara mesti mengeluarkan dua kali lipat ditambah inflasi, sehingga nilainya diperkirakan mencapai Rp 150 triliun
(<http://nasional.kontan.co.id/news/2015-pemerintah-gunakan-fully-funded-bagi-pensiun> (diakses tanggal 23 November 2015)).

Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Tujuan jaminan pensiun adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau kekurangan penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Oleh karena itu, merupakan manfaat pasti

(*defined benefit*) agar dapat memenuhi tujuan mempertahankan kehidupan yang layak disebabkan oleh menurunnya upah/pendapatan atau hilangnya pendapatan (Bab IV Pasal 39, ayat 1, 2, dan 3). Hambatan dalam penyelenggara jaminan pensiun adalah bahwa sampai saat ini, penyelenggara program jaminan pensiun bagi PNS dan anggota TNI masih (sebagian besar) menjadi beban APBN, yaitu sekitar 75 % beban pembayaran pensiun, sementara bagi tenaga kerja swasta, belum terwujud program jaminan pensiun. Apabila tidak ada perubahan, beban pensiun PNS dan anggota TNI dipastikan akan sangat memberatkan APBN, sementara bagi tenaga kerja swasta, akan merupakan ledakan sosial yang dahsyat, dimana sebagian besar manusia lanjut usia tidak akan memiliki jaminan pensiun. Pada tahun 2029, angka itu bisa mencapai 20 sampai 25 juta (Sulastomo, 2008: 27).

Konsep Pendidikan dan Anak Pada Umumnya

Pendidikan wajib di peroleh oleh semua warga negara untuk bisa memiliki ilmu pengetahuan secara luas dan dapat menjadi persyaratan untuk bekerja, serta dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara layak. Menurut Bratanata (1977:3-7) Dalam suatu proses pendidikan anak merupakan faktor utama yang perlu mendapat perhatian.

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilaksanakan secara teratur dan sistematis untuk mendewasakan anak didik dengan memberikan berbagai ilmu pengetahuan melatih berbagai keterampilan dan penanaman tentang nilai-nilai dan sikap hidup yang baik. Pendidikan dapat berlangsung di lembaga-lembaga formal, yaitu di sekolah-sekolah, tetapi dapat juga berlangsung atau terjadi di dalam keluarga atau masyarakat. Peranan dari ketiga-tiganya sangat besar dalam kehidupan seorang anak dalam masa-masa perkembangan dan pertumbuhannya. Dalam proses pendidikan murid merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut berjalan melalui tahap-tahap tertentu, meskipun antara yang satu dengan yang lainakan tidak selalu sama, baik dalam waktu yang diperlukan maupun dalam jenis pertumbuhan dan perkembangannya.

Dengan pendidikan yang baik, setiap orang akan mengetahui hak dan tanggung jawabnya sebagai individu, anggota masyarakat, dan sebagai makhluk tuhan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hal fundamental dalam totalitas kehidupan manusia. Pendidikan bertujuan untuk membantu generasi muda mengembangkan semua unsur potensi pribadinya baik

spiritualitas, moralitas, sosialitas, ras, maupun rasionalitas. Jadi, pendidikan merupakan hak setiap pribadi yang memungkinkan dirinya akan menjadi manusia berkepribadian paripurna di tengah derasnya arus perubahan zaman.

Dalam Suwarno (1985:8) memaparkan Undang-undang pokok pendidikan Nomor 12 tahun 1945 tentang 'Pendidikan dan pengajaran luar biasa'

1. Bab VI Tentang kewajiban belajar

Pasal 10 (1) :

Semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya.

2. Bab XIV Tentang uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran

a). Pasal 22

Di sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah luar biasa tidak di pungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran.

b).Pasal 23

Di semua sekolah negeri, kecuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanya.

Masyarakat bahkan menilai biaya pendidikan sudah semakin mahal, karena biaya

pendidikan yang dia lihat jauh di atas kemampuan membayar dan pendapatan riil yang diterima setiap bulan. Sebagian masyarakat Indonesia masih membayangkan penyelenggaraan pendidikan tradisional dimana biaya penyelenggaraan pendidikan ditanggung oleh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan. Dalam kondisi apapun, masyarakat miskin tetaplah miskin, mereka memiliki sumber pendapatan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Bagi orang miskin, yang membayangkan pendidikan tradisional, maka berapapun biaya yang harus di bayar untuk penyelenggaraan pendidikan tetap akan mengatakan bahwa biaya pendidikan itu mahal. Masyarakat miskin tetap penuh berharap agar seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan di tanggung pemerintah atau pihak lain (Harsono, 2007:31-34).

Konsep Upaya Bertahan Hidup

Dalam memenuhi kebutuhan keluarga diperlukan suatu upaya untuk dapat mencapainya. Upaya merupakan suatu hak dan kewajiban seseorang dalam melakukan tanggung jawabnya, guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya. Adapun beberapa jenis upaya menurut Muhadam (2006) dalam (Rasyid, 2009) :

1. Upaya preventif memiliki konotasi negatif, yaitu sesuatu masalah atau suatu hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkungan personal maupun global.
2. Upaya reservatif, yaitu memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik.
3. Upaya kuratif, adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing siswa pada jalur yang semula.
4. Upaya adaptasi, adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian.

Dalam menambah penghasilan tambahan dalam keluarga, setiap manusia melakukan upaya dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan oleh semua individu dalam keluarga supaya dapat bertahan hidup. Menurut Kusnadi (2000:38) mengatakan bahwa:

“strategi yang lain adalah menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan sosial yang telah membentuk atau jaringan sosial. Fungsi jaringan sosial ini adalah untuk memudahkan anggota-anggotanya memperoleh akses kesumberdaya ekonomi yang tersedia di lingkungannya. Jaringan sosial dapat dibentuk berdasarkan basis kerabat, tetangga, pertemanan, atau campuran dari unsur-unsur tersebut. Jaringan sosial yang anggota-anggotanya memiliki tingkat kesamaan kemampuan sosial ekonomi (bersifat horizontal) mewujudkan aktivitasnya dalam

hubungan tolong-menolong. Jaringan sosial yang anggota-anggotanya bervariasi tingkat kemampuan sosial-ekonominya (bersifat vertikal) akan mewujudkan aktivitasnya dalam hubungan patron-klien. Isi dari jaringan hubungan-hubungan sosial tersebut adalah tukar-menukar dan peminjaman timbal-balik sumberdaya ekonomi, seperti uang, barang (barang konsumsi), atau jasa. Jaringan sosial semakin penting fungsinya dalam suatu masyarakat yang memiliki sumberdaya tersebut.”

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pendidikan anak sekolah merupakan tanggung jawab keluarga. Individu-individu yang ada didalamnya harus dapat berusaha maksimal untuk mencari penghasilan tambahan. Upaya bertahan hidup yang dilakukan oleh pensiun pegawai negeri sipil bertujuan untuk dapat mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak yang masih sekolah. Corner dalam Kusnadi (2000:187-189) mengemukakan beberapa upaya yang dikembangkan untuk menjaga kelangsungan hidup, diantaranya adalah:

1. Melakukan beranekaragam pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Pekerjaan-pekerjaan yang tersedia di desa dan dapat merendahkan martabat pun akan tetap diterima kendati upah rendah, atau balasan berupa pangan membuat suatu pekerjaan menjadi lebih menarik.

2. Jika kegiatan-kegiatan tersebut kurang memadai, penduduk miskin akan berpaling pada sistem penunjang yang ada di lingkungannya. Sistem ikatan kekerabatan, ketetanggaaan, dan pengaturan tukar-menukar secara timbal balik merupakan sumberdaya yang sangat berharga bagi penduduk miskin. Dalam menghadapi penghasilan dan peluang yang semakin merosot tajam, penduduk miskin ini masih dapat bertahan dengan harapan para kerabat atau keluarganya, tetangganya dan teman-temannya berbagai kelebihan apapun yang mereka miliki. Pola-pola hubungan sosial demikian memberi rasa aman dan terlindungi bagi orang miskin. Bekerja lebih banyak meskipun lebih sedikit masukan, strategi yang bersifat ekonomis ini ditempuh untuk mengurangi tingkat kebutuhan konsumsi sehari-hari.

3. Memilih alternatif lain jika kedua alternatif di atas sulit dilakukan dan kemungkinan untuk tetap bertahan hidup di desa sudah sangat kritis. Rumah tangga miskin tersebut harus menghadapi pilihan terakhir agar segera meninggalkan desa dan bermigrasi ke kota.

Kebutuhan-kebutuhan Dasar Manusia dan Kesejahteraan

Kebutuhan Dasar Manusia

Tujuan hidup manusia pada dasarnya adalah untuk hidup berkeluarga dan memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.

Membicarakan kebutuhan-kebutuhan manusia maka tidak boleh dilupakan aspek jasmani dan rohaninya. Untuk pertumbuhan atau pemeliharaan jasmani manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, air, udara, pemeliharaan kesehatan dan istirahat yang cukup. Kebutuhan lain ialah yang berhubungan dengan aspek rohani. Untuk menggolongkan kebutuhan-kebutuhan tersebut secara pasti memang sulit. Kebutuhan manusia dapat merupakan hal yang subyektif. Manusia sebagai makhluk sosial, sebagai subyek adalah manusia yang mempunyai kebutuhan manusiawi yang sama, akan tetapi setiap manusia adalah unik dan berbeda satu sama lain. Namun secara umum dapatlah dikemukakan kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

“Elizabeth Nicholds mengemukakan empat dasar kebutuhan manusia yaitu : kebutuhan kasih sayang; kebutuhan untuk merasa aman; kebutuhan untuk mencapai sesuatu dan kebutuhan agar di terima dalam kelompok. Sedangkan Laird & Laird menguraikan lima tingkat kebutuhan manusia sebagai berikut :

- 1) Kebutuhan untuk hidup
- 2) Kebutuhan merasa aman
- 3) Kebutuhan untuk bertingkah laku sosial
- 4) Kebutuhan untuk dihargai
- 5) Kebutuhan untuk melakukan pekerjaan yang disenangi

Usaha Kesejahteraan Sosial

Pada umumnya masyarakat Indonesia memiliki kesejahteraan yang kurang, baik dalam pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang bermata pencaharian bercocok tanam dan nelayan. Menurut Sumarnonugroho (1982:27,33-34) kesejahteraan (sejahtera) mempunyai arti: aman sentosa, makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Di Indonesia, pengertian kesejahteraan sosial telah dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 (1) yang berbunyi:

“Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila”.

Usaha kesejahteraan Anak

Pada umumnya setiap anak ingin mendapatkan kesejahteraan dengan cara hak dan kewajiban anak yang harus dijalankan. Menurut Sumarnunogroho (1982:104-105) pertumbuhan dan perkembangan secara wajar bagi anak sangat menentukan kebutuhan pribadi

anak dalam menyongsong masa depannya untuk menjadi manusia dewasa. Pada konsep *parens patriae*, bila asuhan orang tua (*parental care*) kurang atau tidak ada maka masyarakat bertanggung jawab dan berkewajiban menjamin kondisi yang memungkinkan anak tumbuh serta berkembang secara wajar. Sebab asuhan orang tua merupakan ladang yang subur bagi pertumbuhan rasa, cipta, karsa seorang anak. Orang tua adalah sumber asli yang memancarkan kasih sayang, perhatian, kemesraan, keramahtamahan dan penerimaan terhadap keberadaan anak sebagaimana adanya. Bagi anak, orang tua merupakan tangan pertama yang menyampaikan pemenuhan-pemenuhan materiil.

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini mendasar pada hasil penelitian yang berfokus pada upaya pensiun pegawai negeri sipil dan menjaga kelangsungan pendidikan anak menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti berusaha untuk memberikan dekripsi, gambaran, fakta-fakta yang ada dilapangan, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Untuk teknik penentuan informan peneliti menggunakan *purposive sampling* sedangkan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara

dan dokumentasi. Data yang diperoleh dilapangan di analisis dengan beberapa alur yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teori. Triangulasi dengan memanfaatkan sumber, dilakukan dengan cara mengkoscek kembali data-data yang diperoleh dari informan pokok maupun informan tambahan, sehingga memperoleh data yang mempunyai makna yang sama. Selain itu peneliti mengkoscek data dari hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh sebelumnya. Sedangkan triangulasi dengan memanfaatkan teori, dilakukan dengan cara membandingkan teori-teori yang ada untuk mendapatkan kejelasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pensiunan Dalam Menjaga Kelangsungan Pendidikan Anak

Dalam penelitian yang berjudul upaya pensiunan pegawai negeri sipil dalam menjaga pendidikan anak ini, menjelaskan bagaimana pensiunan memilih upaya untuk dapat menjaga kelangsungan pendidikan anak mengingat gaji dan hak-hak pada saat aktif sebagai pegawai negeri sipil sudah di kurangi dan tidak diperoleh lagi sehingga untuk kelangsungan pendidikan anak-anak mereka pensiunan melakukan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan

disertifikasi pekerjaan, memanfaatkan jaringan sosial, dan pola hidup hemat. Karena upaya tersebut sangat mudah dilakukan oleh pensiun, mengingat gaji pensiun sudah berkurang dibandingkan waktu aktif menjadi pegawai negeri sipil, fisik yang mulai lemah yang disebabkan oleh umur yang semakin tua sehingga tidak bisa bekerja terlalu berat, serta peluang kerja terbatas yang mungkin hanya bisa bekerja dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki. Upaya semacam ini dilakukan oleh pensiun untuk dapat memperoleh penghasilan tambahan dan pensiunan yang menjadi kepala keluarga tidak hanya membiayai pendidikan anak saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi keluarganya.

Melakukan Diversifikasi Usaha

Upaya pensiunan dalam menjaga kelangsungan pendidikan anak dengan bekerja serabutan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya yaitu dengan cara menjadi makelar (jual beli motor), bertani dan usaha kontrakan salah satunya yang dilakukan informan pokok bapak ST (62 tahun), dimana untuk dapat terus menyekolahkan kedua anaknya sampai perguruan tinggi informan ST tidak hanya mengandalkan gaji pensiunan saja, tetapi juga mencari

penghasilan tambahan supaya anak masih tetap sekolah sampai perguruan tinggi. Untuk memperoleh penghasilan tambahan informan ST bekerja sebagai makelar sepeda dengan cara menjualkan sepeda orang ke orang lain atau sebagai perantara supaya mendapat upah dari penjualan sepeda tersebut. Untuk upah dari menjual belikan sepeda biasanya informan ST mendapat upah sekitar Rp.100.000 - Rp.500.000 tergantung dari bagus atau tidaknya sepeda motor yang akan di jual. Sepeda motor yang akan dijual tidak setiap hari langsung laku dibeli orang, tetapi informan ST harus menawarkan terlebih dahulu kepada teman, saudara, dan tetangganya supaya dapat di lihat dan cocok untuk dibeli. Dalam proses jual beli ini ada tawar menawar tergantung dengan pas atau tidaknya harga yang ditawarkan oleh penjual. Terkadang motor yang akan dijual oleh informan ST membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pembeli yang benar-benar cocok. Apalagi pekerjaan makelar/perantara ini harus pintar bicara dan mengerti tentang sepeda motor supaya pembeli tertarik untuk melihat dan apabila cocok langsung dapat dibeli. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan ST (62 tahun):

“saya bekerja makelar untuk menambah penghasilan selain gaji pensiunan, karena kalau hanya

mengandalkan gaji pensiunan tidak cukup untuk membiayai kedua anak yang masih sekolah dan kuliah di universitas swasta. Apalagi sekolah sekarang tidak sepenuhnya gratis, tetapi masih ada pengutan seperti, membayar uang gedung, membeli buku dan urunan kegiatan sekolah”.
(ST: 02 April 2015)

Memanfaatkan Jaringan Sosial

Kondisi memanfaatkan lembaga peminjaman kredit ini dilakukan oleh keluarga informan UK demi menjaga kelangsungan pendidikan anak. Informan UK merupakan seorang istri yang menjadi kepala keluarga, karena suaminya sudah meninggal cukup lama. Gaji pensiunan UK selain untuk membiayai pendidikan anak tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gaji yang diterima setiap bulan dirasa tidak cukup untuk pendidikan anak dan kebutuhan hidup. Untuk mengisi ketidakcukupan gaji pensiunan tersebut Informan UK menerapkan strategi bertahan hidup dengan cara memanfaatkan peminjaman kredit dengan meminjam uang ke bank yang mengeluarkan gaji pensiunannya. Biasanya informan UK meminjam uang ke bank yang mengeluarkan gaji pensiunannya seperti BTPN dengan jaminan SK pensiun sehingga nanti pada saat membayar tagihan ke bank cukup memotong gaji pensinannya saja,

berikut adalah hasil wawancara dengan informan UK (67 tahun):

“gaji pensiunan yang saya terima tidak cukup untuk membiayai pendidikan anak, saya meminjam uang ke bank yang mengeluarkan gaji pensiunan saya, dan jaminannya hanya SK pensiunan. Karena persyaratannya tidak sulit dan pembayaran setiap bulan hanya memotong gaji pensiunan saya”.(informan UK: 11 April 2015)

Selain itu adapun yang memanfaatkan jaringan sosial di lingkungan sekitar rumahnya, seperti yang dilakukan oleh informan G ini apabila gaji pensiunan yang digunakan untuk membiayai pendidikan anak dirasa tidak cukup, informan G menerapkan upaya bertahan hidup dengan cara memanfaatkan hubungan sosial di lingkungan sekitar rumah dengan meminjam uang kepada saudara dan tetangga serta informan G juga mengandalkan gaji istri yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil. Hal ini menggambarkan bagaimana hubungan keluarga pensiunan dengan lingkungan sosialnya dan hubungan ini akan bersifat timbal balik atau sebaliknya. Berikut hasil wawancara dengan informan G (63 tahun):

“gaji pensiunan saya digunakan untuk membiayai pendidikan anak saya yang sedang kuliah dan sekolah menengah pertama, bila gaji saya tidak cukup saya mengandalkan gaji istri saya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan meminjam kepada saudara atau tetangga. Karena gaji pensiunan saya

tidak hanya digunakan untuk biaya pendidikan saja, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.
(Suami informan G: 08 April 2015)

Hidup Hemat

Pendapatan dari hasil gaji pensiun setiap bulan yang pas-pasan untuk membiayai pendidikan anak yang masih kuliah, membuat informan MI untuk hidup hemat dalam pengeluaran gajinya. Supaya tetap bisa bertahan hidup serta dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, keluarga informan MI memilih upaya yang mudah dengan cara hidup hemat dengan menyisihkan sebagian gaji pensiun serta pola konsumtif yang seadanya dan tidak berlebihan, karena biaya kebutuhan anak yang masih kuliah cukup besar, hal inilah yang memaksa informan MI untuk hidup hemat apa adanya. Memilih alternatif hidup hemat yang dilakukan oleh informan MI merupakan bentuk upaya lain yang dilakukan informan karena sudah tidak adanya ketersediaan tempat untuk bekerja sehingga memaksa untuk selalu hidup hemat sampai anaknya lulus kuliah, berikut juga ungkapan dari istri informan MI:

“iya untuk memenuhi biaya pendidikan anak saya hidup hemat apa adanya supaya anak bisa lulus kuliah. Dan saya juga membantu lewat do’a untuk kelancaran biaya

dan pendidikan anak”.(Istri informan MI: 09 April 2015)

Pentingnya Pendidikan Bagi Keluarga Pensiunan

Biaya Pendidikan

Pendidikan di Indonesia memanglah tidak sepenuhnya gratis atau bebas biaya, tetapi masih banyak pungutan dan iuran yang membebani orang tua siswa. Hal inilah yang membuat pensiunan khususnya yang mempunyai anak sekolah/kuliah merasa bingung untuk bisa mencari mencari penghasilan tambahan sehingga bisa membiayai anak yang masih menempuh pendidikan. Dalam biaya pendidikan masih ada iuran tambahan seperti pembayaran SPP, uang buku, uang gedung/kegiatan sekolah, uang kos-kosan dan biaya hidup bagi yang kuliah diluar kota. Berikut ungkapan informan ST dalam wawancara adalah:

“biaya pendidikan anak saya digunakan untuk membayar uang gedung, buku, daftar ulang, dan lainnya. Sehingga pembayaran uang sekolah tidak bisa ditunda. Kalau saya hanya mengandalkan gaji pensiunan saja tidak cukup jadi perlu usaha lain yang menghasilkan uang untuk dapat membiayai pendidikan anak”.
(Informan ST: 02 April 2015)

Dengan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, seorang manusia diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial

mereka ke arah yang lebih baik. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Sumarmonugroho (1982:51) lihat bab 2 hal 26, “usaha kesejahteraan sosial merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Oleh karena itu dalam upaya pemenuhannya perlu tersedia sumber-sumber yang di kelompokkan menjadi :

1. Uang atau barang, antara lain tunjangan-tunjangan, pembagian kembali (retribusi) hasil pendapatan dan bahan material lainnya untuk keperluan bantuan.
2. Jasa pelayanan (*service*) berupa bimbingan dan penyuluhan.
3. Kesempatan-kesempatan, seperti pendidikan, latihan-latihan, pekerjaan dan sebagainya.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini terdapat beberapa alasan yang dikemukakan pensiun untuk mencari penghasilan tambahan. Selain gaji pensiun yang diterima tidak cukup, juga pensiun tidak hanya membiayai pendidikan anak. Akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kegiatan pensiun tidak hanya bekerja sehari penuh diluar rumah, tetapi pensiunan menghabiskan waktu luangnya untuk berkumpul dengan keluarga dirumah. Dari penjelasan teori dan fenomena yang dilakukan pensiun di Desa

Sidopekso Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sebagaimana pensiunan yang lain, bahwa pensiunan yang berada di Desa Sidopekso tidak menerima hak-hak seperti pada saat akti fsebagai PNS, dan hanya mendapatkan gaji pokok 75% dari saat aktif menjadi pegawai negeri sipil. Gaji yang di dapat oleh pensiun yaitu antara Rp.3.000.000,-sampai dengan Rp.4.000.000,- tergantung dari pangkat dan golongan pada saat pensiun. Serta pada waktu pension tidak memiliki pekerjaan yang sibuk karena faktor usia, fisik, dan keahlian yang dimiliki seorang pensiun. Kegiatan yang dilakukan seorang pensiunan yang berada di Desa Sidopekso hanya meluangkan waktu dengan keluarga.

2. Pensiunan yang berada di Desa Sidopekso sangat memperhatikan pendidikan anak, karena pendidikan merupakan kebutuhan yang paling utama yang diinginkan oleh para pensiunan supaya dapat merubah status sosial di masyarakat dan mempunyai pekerjaan sesuai dengan keinginan anak. Dari beberapa informan pensiun yang berada di Desa Sidopekso rata-rata anaknya sudah masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN/S) maupun Swasta seperti kuliah di Universitas Malang, Brawijaya, Panca Marga, dan akademi kebidanan serta jurusan

yang di pilih sesuai dengan keinginan anak. Untuk biaya di perguruan tinggi tersebut bermacam-macam mulai dari Rp 7.500.000 sampai Rp 15.000.000 tergantung jurusan yang dipilih. Biaya tersebut bulum termasuk biaya hidup dan kos-kosan setiap bulan yang mencapai Rp 1.000.000 sampai 2.500.000 setiap bulan selama masih kuliah di luar Kabupaten Probolinggo.

3 3. Terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan pendidikan anak tersebut, para pensiunan di Desa Sidopekso melakukan upaya sebagai berikut :

A. Pensiunan Desa Sidopekso melakukan diversifikasi pekerjaan atau penganekaragaman pekerjaan, para pensiunan berusaha berkerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Seperti jual beli motor, bisnis kontrakan rumah, dan petani papaya. Pekerjaan tambahan memiliki makna yang sangat berarti bagi kelangsungan ekonomi keluarga dan pendidikan anak para pensiunan. Hal ini terkait dengan gaji pensiun yang tidak cukup untuk memenuhi

kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan keluarga.

B. Pensiunan memanfaatkan jaringan sosial dan memanfaatkan lembaga peminjaman kredit seperti hubungan kekerabatan, hubungan tetangga dan hubungan dengan lembaga peminjaman kredit yaitu bank. Pinjaman tersebut berupa pinjaman uang baik dari saudara, tetangga yang dianggap mampu, serta meminjam uang yang mengeluarkan gaji pensiun dengan jaminan SK pensiun.

C. Pensiunan memilih alternatif lain yaitu hidup hemat meminimalisir pengeluaran dengan cara menyisihkan sebagian dari gaji pension untuk biaya pendidikan anak serta mengkonsumsi kebutuhan sandang dan pangan dengan sederhana dan tidak berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Situmorang, U. M. 1994. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: Rajawali. [bagi-pensiun](#) (diakses tanggal 23 November 2015).

Bratanata, A.S. 1977. *Pendidikan Anak-anak Terbelakang*. Bandung: N.V. Masa Baru.

Suwarno. 1985. *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta: Aksara Baru.

Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Surabaya: Surabaya Press Jaya.

Kusnadi. 2000. *Nelayan Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Sumarnonugroho, T. 1982. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: PT Hanindita.

Perundang-Undangan

Undang-undang pokok pendidikan Nomor 12 tahun 1945 tentang *Pendidikan dan pengajaran luar biasa*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 2 (1)*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

Internet

(http://www.bpjs.info/peraturan/Peraturan_Pemerintah-31/) (diakses tanggal 03 November 2015).

(<http://nasional.kontan.co.id/news/2015-pemerintah-gunakan-fully-funded-bagi-pensiun>) (diakses tanggal 23 November 2015).

(<http://nasional.kontan.co.id/news/2015-pemerintah-gunakan-fully-funded->